

MENATA KEMBALI KELOMPOK TANI DI KOTA AMBON (Suatu Pemikiran)

REARRANGEMENT FARMER GROUP IN AMBON CITY (A Reflection)

Inta P. N. Damanik

Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pattimura
Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon - 97233

E-mail: intadamanik@ymail.com

Abstrak

Kelompok tani merupakan organisasi sosial di tingkat petani yang berperan penting dalam mengembangkan kapasitas petani dalam mengelola usahatani. Data menunjukkan bahwa 82,71 persen kelompok tani di Kota Ambon masih berada pada kelas Pemula dan selebihnya termasuk kelas Lanjut. Hal ini menyiratkan bahwa pengembangan kelompok tani di Kota Ambon belum berjalan dengan baik walaupun dari segi umur kelompok bukan tergolong muda. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemikiran tentang menata kembali kelompok tani di Kota Ambon agar dapat berperan sebagaimana mestinya. Tulisan ini merupakan analisis terhadap studi kepustakaan yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa penataan kembali kelompok tani di Kota Ambon mutlak diperlukan melalui lima upaya, yaitu: (1) mendata kembali keberadaan kelompok tani, (2) mendata kembali keanggotaan dan pengurus kelompok tani, (3) penataan distribusi PPL, (4) menghidupkan dan melestarikan kearifan lokal, dan (5) keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang No.16/2006. Kelima upaya ini diharapkan dapat mengembangkan kelompok tani menjadi kelompok tani yang maju dan mandiri sebagai wahana belajar dan bekerjasama bagi petani.

Kata kunci: Kelompok tani, kelas kelompok tani

Abstract

Farmer group is social organizations of farmer that play an important role in developing farmers' capacity to manage farming. The data showed that 82.71 percent of farmer groups in Ambon City were still in the bottom two classes of the four farmer group classes. This implied that the development of farmer groups in Ambon City had not gone well, although farmer groups were not classified as young groups. This paper aimed to provide thoughts on reorganizing farmer groups in Ambon City so that groups can play the role as it should be. This paper was an analysis of literature study presented in descriptive qualitative. The result of the analysis concluded that the reorganization of farmer groups in Ambon City is absolutely necessary and can be done through five efforts, namely: (1) reconstruct the existence of farmer groups, (2) reconstruct the membership and management of farmer groups, (3) structuring the distribution of agricultural extension agent, (4) Revive and preserve local wisdom, and (5) the government's seriousness in implementing Undang-Undang No.16/2006. These five efforts are expected to develop farmer groups into advanced and independent farmer groups as a vehicle for farmer to learn and work together.

Key words: Farmer group, farmer group classification

Pendahuluan

Kota Ambon terletak di Pulau Ambon dan merupakan ibukota Provinsi Maluku. Luas wilayah daratan adalah 359,45 km², sedangkan luas wilayah laut adalah 17,55 km². Sebagian besar daratan terdiri dari daerah berbukit yang berlereng terjal seluas kurang lebih 186,90 km² atau 51,99 persen dan daerah dataran dengan kemiringan sekitar 10 persen seluas 55 km² atau 15,30 persen dari luas seluruh wilayah daratan. Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, pada daerah dataran di Kota Ambon juga ditemukan daerah-daerah pertanian dengan sumbangan pada PDRB mencapai 16,05 persen atau senilai Rp 812 320,21 milyar pada tahun 2012. Jenis produksi pertanian cukup beragam, diantaranya palawija, buah-buahan, sayur mayur, peternakan dan perikanan laut (BPS Kota Ambon, 2014).

Disamping itu, juga terdapat produksi buah-buahan yang pada tahun 2013 jumlah panen mencapai 1.732 ton yang antara lain terdiri dari alpukat, jeruk, duku, mangga, durian, papaya, belimbing, sukun, pisang, rambutan dan manggis. Hasil sayur-sayuran tahun 2013 mencapai 7.024,79 ton yang terdiri dari kubis, petsai, kacang panjang, tomat, buncis, kangkung, bayam, ketimun, cabe besar, cabe rawit, dan lain-lain. Selain itu hasil yang tak kalah hebat dan memiliki nilai ekonomi tinggi adalah hasil perikanan laut, tahun 2013 telah memanen 38 934,50 ton ikan laut dengan nilai ekonomi Rp. 218 milyar lebih (BPS Kota Ambon, 2014). Berdasarkan kondisi sektor pertanian Kota Ambon, maka fokus perekonomian Kota Ambon ke depan adalah fokus pembangunan ekonomi berbasis pertanian, perdagangan dan industri makanan, terutama hasil pertanian dan perikanan laut.

Penentuan fokus pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian dalam pelaksanaannya akan membutuhkan dukungan dari semua pihak yang terkait dengan bidang pertanian, baik secara formal maupun non formal, salah satu diantaranya adalah dukungan dari para petani sebagai salah satu pelaku utamanya. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Pasal 19 disyaratkan perlu adanya kelembagaan

pelaku utama yang dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi. Pada tingkat petani, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru karena pada umumnya petani tidak dapat dipisahkan dari kelompok tani.

Menurut Undang-Undang No. 16/2006, kelembagaan yang dimaksud sebagai kelembagaan pelaku utama tersebut difasilitasi dan diberdayakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya. Dalam hal ini jelas bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab dalam mengembangkan kelompok tani.

Di Kota Ambon sebagian besar petani sudah merupakan anggota kelompok tani. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Maluku tahun 2016, ada 164 kelompok tani yang dibentuk dalam rentang tahun 1995-2016 dan seluruhnya belum dikukuhkan. Keseluruhan kelompok tani ini tergolong dalam dua kelas, yaitu kelas pemula dan lanjut yang penilaiannya didasarkan atas sepuluh jurus kemampuan kelompok tani. Sebanyak 163 kelompok tani atau sekitar 99,39 persen masih berada pada kelas pemula padahal ditinjau dari segi umur kelompok tani, 26 kelompok tani (15,85%) bukan kelompok yang berumur muda (berumur lebih dari 7 tahun). Tujuh kelompok tani sudah tidak aktif lagi. Kondisi ini menimbulkan pemikiran terkait hal-hal yang dapat dilakukan untuk menata kembali kelompok tani di Kota Ambon, tentu saja dengan mengedepankan kondisi realita kehidupan kelompok tani di Kota Ambon.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka ada dua tujuan pembahasan yang terkait dengan upaya menata kembali kelompok tani di Kota Ambon, yaitu: (1) Mengidentifikasi pelaksanaan fungsi kelompok tani di Kota Ambon, dan (2) Mengidentifikasi langkah-langkah untuk menata kembali kelompok tani di Kota Ambon.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian literatur dari berbagai sumber terkait. Pembahasan disajikan secara deskriptif kualitatif dengan mengedepankan

pendekatan ilmiah serta tetap memperhatikan aspek substansi, konsistensi, dan sistematis dalam penulisan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Fungsi Kelompok Tani di Kota Ambon

Kelompok tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri atas petani dewasa (pria atau wanita) maupun petani taruna (pemuda atau pemudi), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani (Departemen Pertanian *dalam* Mardikanto, 1996). Kelompok tani merupakan bagian yang tidak terpisahkan ketika membicarakan tentang petani dan usahatani. Kelompok tani diharapkan dapat membantu para petani anggotanya mencapai kemajuan di dalam usahatani yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan usahatani seperti halnya pada petani kentang di Guinea Tengah (Tolno, *et al.*, 2015). Pada kenyataannya belum semua kelompok tani membawa manfaat bagi anggotanya, karena itu, masih banyak petani yang belum menjadi anggota kelompok tani. Seperti hanya di Uganda, hanya 16 persen kepala keluarga dari rumahtangga petani yang menjadi anggota kelompok tani (Mwaura, 2014). Menyikapi hal tersebut, penerapan fungsi-fungsi kelompok tani sebagaimana mestinya menjadi penting agar dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.

Pada dasarnya, ada dua fungsi utama kelompok tani, yaitu: (1) sebagai wahana belajar dan (2) wahana bekerjasama bagi para petani. Wahana belajar dimaksudkan bahwa kelompok tani dapat merupakan wadah bagi para anggotanya untuk saling bertukar informasi usahatani. Disamping itu, kelompok tani merupakan media yang paling cocok sebagai jalan masuknya inovasi baru di bidang pertanian. Wahana bekerjasama dimaksudkan bahwa melalui kelompok tani, para petani dapat saling bekerjasama melaksanakan usahatani, baik dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi seperti pembelian pupuk, benih, pestisida, dan sarana lainnya, maupun kerjasama dalam pemenuhan tenaga kerja usahatani.

Kedua fungsi kelompok tani tersebut hanya akan dapat berjalan dengan baik jika kelompok tani tersebut benar-benar hidup, bukan asal hidup. Kenyataan menunjukkan banyak sekali kelompok tani yang tidak lagi beraktivitas dan tinggal nama saja, tetapi kelompok tani ini akan hidup kembali jika ada bantuan atau program yang ditujukan untuk kelompok tani atau yang hanya dapat diberikan kepada kelompok tani. Ironis memang, namun itulah kenyataannya.

Bagaimana halnya dengan di Kota Ambon? Data menunjukkan bahwa 82,71 persen dari 133 kelompok tani yang ada di Kota Ambon tergolong kedalam kelas Pemula, yaitu kelas yang paling rendah dari empat kelas kelompok tani (Pemula, Lanjut, Madya, dan Utama). Dilihat dari segi umur, kelompok tani-kelompok tani ini bukan lagi berusia muda. Penilaian kelas kelompok tani dilakukan menggunakan 10 jurus kemampuan kelompok tani, yaitu (Departemen Pertanian *dalam* Mardikanto, 1996): (1) Daya serap informasi, dimaksudkan sebagai kelincahan kontak tani dan pengurus dalam mencari, mengolah dan menjelaskan info yang bermanfaat bagi seluruh anggota; (2) Perencanaan, dimaksudkan sebagai kemampuan merencanakan kegiatan-kegiatan kelompok untuk meningkatkan produksi dan pendapatan; (3) Kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan, dimaksudkan sebagai kekompakan para anggota; (4) Pengembangan fasilitas dan sarana, dimaksudkan sebagai perkembangan fasilitas dan sarana yang mendukung/ menunjang usahatani; (5) Pemupukan modal, dimaksudkan sebagai perkembangan permodalan-pembinaan berkoperasi; (6) Ketaatan terhadap perjanjian, dimaksudkan sebagai kemampuan dalam menaati perjanjian (contoh dalam perkreditan); (7) Kemampuan mengatasi keadaan darurat, dimaksudkan sebagai kecekatan dalam penggerakan daya dan untuk mengatasi masalah mendesak; (8) Pengembangan kader, dimaksudkan sebagai pembinaan anggota sehingga meningkatkan keahliannya; (9) Hubungan melembaga dengan koperasi, dimaksudkan sebagai semua anggota menjadi anggota koperasi kontak tani/pengurus kelompok; dan (10) Produktivitas usahatani, dimaksudkan sebagai produktivitas usahatani yang tinggi.

Melihat kepada poin-poin yang menjadi penilaian kelas kelompok tani tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kelompok tani memiliki ruang lingkup

peranan yang sangat penting bagi para petani dalam mengelola usahatani. Sepuluh jurus kemampuan kelompok tani merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh kelompok tani yang aktif, bukan kelompok tani yang pasif. Bila dikaitkan dengan kelas kelompok tani di Kota Ambon, maka dapat dikatakan bahwa kelompok tani di Kota Ambon memerlukan pembinaan yang serius dari semua pihak yang berkompeten. Dengan kata lain, kelompok tani di Kota Ambon belum berfungsi sebagaimana mestinya. Jika demikian halnya, sejauh manakah pelaksanaan fungsi kelompok tani di Kota Ambon?

Berdasarkan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan selama ini oleh para mahasiswa dan staf pengajar dari Universitas Pattimura dan penulis sering terlibat didalamnya dapat disimpulkan bahwa kelompok tani di Kota Ambon masih jauh dari apa yang disebut sebagai kelompok tani. Fungsi kelompok tani sebagai wahana belajar dan wahana bekerja sama masih sangat kurang karena para petani lebih cenderung untuk bekerja sendiri. Hal ini disebabkan anggapan bahwa untung atau rugi akan ditanggung oleh petani sendiri, apalagi tidak semua petani memiliki motivasi yang sama dalam berusahatani. Keadaan ini bukan hanya terjadi pada petani yang merupakan suku asli setempat, tetapi juga petani pendatang dari luar daerah.

Salah satu contoh adalah kelompok tani yang ada di Desa Nania Kecamatan Teluk Ambon. Kelompok tani ini terbentuk dengan kepengurusan yang lengkap, namun semua urusan tentang usahatani hampir tidak ada yang dilakukan secara berkelompok. Sebagian besar anggota kelompok tani adalah suku Bantaeng dari Sulawesi Selatan dan para petani tinggal pada rumah-rumah kebun di tengah-tengah kebun milik petani. Pada waktu-waktu tertentu para petani akan pulang ke daerahnya untuk berkumpul bersama keluarganya. Dengan kata lain, usahatani di Ambon hanya untuk mencari nafkah sedangkan hampir semua keluarga petani berdomisili di daerah asalnya, hanya beberapa petani yang membawa keluarganya ke Ambon. Hal ini menyebabkan para petani sangat giat dalam bekerja untuk mendapatkan uang yang lebih banyak agar dapat membiayai kehidupan keluarganya. Kondisi ini menyebabkan para petani enggan untuk

bekerjasama dengan petani lainnya karena khawatir akan kecewa dengan kinerja petani lainnya, meskipun berasal dari daerah yang sama.

Bagi para petani yang merupakan penduduk asli memang keberadaan kelompok tani kurang membawa pengaruh karena pada umumnya para petani merupakan petani tanaman tahunan, seperti buah-buahan (durian, langsung, duku, manggis, nangka, salak, dan sebagainya) dan tanaman perkebunan (cengkeh, pala, sagu, dan sebagainya). Memang kelompok tani juga ada di wilayah ini, namun lebih menjurus kepada kelompok kerja karena adanya program-program tertentu.

Tidak berfungsinya kelompok tani sebagai wahana belajar juga tercermin dari usaha mandiri petani untuk mendapatkan informasi tentang usahatani. Sasaran utama para petani untuk mendapatkan informasi pertanian adalah para penjual sarana produksi pertanian (saprota). Jika informasi yang dicari adalah tentang penggunaan obat-obatan untuk membantu pertumbuhan tanaman, maka petani akan diberikan informasi tentang penggunaan obat-obatan yang dijual oleh pemilik toko tersebut. Hal ini menyebabkan tingkat penggunaan obat-obatan juga semakin tinggi, baik dari jenis maupun dosisnya. Pada saat ini, tingkat penggunaan obat-obatan pada usahatani sayur-sayuran terutama oleh petani pendatang di Kota Ambon sudah cukup tinggi dan jika dibiarkan terus akan dapat membahayakan konsumen.

Kerjasama kelompok tani dalam hal pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga hampir tidak terlihat. Kebutuhan mesin pompa air, selang air, pembelian pupuk kandang, *handsprayer*, dilakukan oleh para petani secara pribadi. Bagi petani yang belum memiliki mulanya meminjam kepada petani yang memiliki, namun keadaan itu tidak akan berlangsung lama karena faktor “malu hati”, akibatnya petani yang tidak mampu membeli akan menanggung resiko atau mencari tempat meminjam uang untuk membeli alsintan tersebut.

Keadaan tersebut seharusnya tidak terjadi jika para petani menyadari akan pentingnya manfaat kelompok tani dan mau melaksanakan fungsi-fungsi kelompok tani dengan benar. Torres (Mardikanto, 1996) mengungkapkan beberapa keuntungan dari pembentukan kelompok tani, diantaranya: (1) Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya kepemimpinan

kelompok, (2) Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani, (3) Semakin cepatnya proses perembesan (difusi) penerapan inovasi (teknologi) baru, (4) Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang (pinjaman) petani, (5) Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) maupun produk yang dihasilkan, dan (6) Semakin dapat membantu efisiensi pembagian air irigasi serta pengawasan oleh petani.

Hal yang penting saat ini adalah menata kembali kelompok tani di Kota Ambon dengan melihat situasi dan kondisi faktual yang dihadapi oleh petani. Dengan demikian, penataan tersebut benar-benar sesuai bagi keberadaan petani dan kelompok taninya.

Faktor Penentu Penataan Kembali Kelompok Tani di Kota Ambon

Menata kembali kelompok tani di Kota Ambon dimaksudkan untuk memperkuat peranan kelompok tani sebagai alat bagi para anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Fokus penataan adalah pada kelompok tani itu sendiri serta faktor-faktor lain yang terkait dengan keberadaan kelompok tani tersebut. Berbicara tentang kelompok tani di Kota Ambon, maka keadaan alam Kota Ambon menjadi salah satu faktor penentu dalam menata kembali kelompok tani di kota itu.

Seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Ambon memiliki penduduk yang heterogen, baik dari suku, ras, dan agama dengan variasi tingkat pendidikan, jenis mata pencaharian, dan karakteristik-karakteristik kependudukan lainnya. Kekhasan Kota Ambon adalah wilayahnya yang merupakan perpaduan antara daratan dan lautan yang menyebabkan hampir setiap desa/kelurahan di Kota Ambon memiliki wilayah darat dan laut. Hal ini menyebabkan mata pencaharian penduduk yang mengandalkan sumberdaya alam menjadi lebih bervariasi, yaitu sebagai petani, peternak, dan nelayan atau kombinasi ketiganya. Disamping itu, lokasi pemukiman penduduk (petani) juga menyebabkan perbedaan jenis komoditi usahatani yang diusahakan, misalnya penduduk yang mendiami kampung-kampung (*petuanan*) yang masih didominasi penduduk asli

akan cenderung mengusahakan tanaman tahunan sebagai tanaman warisan dengan mata pencaharian tambahan sebagai nelayan kecil-kecilan. Berbeda dengan wilayah yang sudah dominan dihuni oleh para pendatang seperti suku Bugis, Buton, dan Jawa yang cenderung mengusahakan tanaman sayur-sayuran dan palawija. Keadaan ini seharusnya menjadi titik penentu dalam pembinaan kelompok tani.

Kota Ambon dibagi ke dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sirimau, Nusaniwe, Teluk Ambon, Teluk Ambon Baguala, dan Leitimur Selatan. Dari lima kecamatan ini, hanya satu kecamatan, yakni kecamatan Leitimur Selatan yang dapat dikatakan hampir homogen dalam hal keadaan alam, penduduk, dan budayanya, sedangkan empat kecamatan lainnya sangat heterogen karena memiliki bagian-bagian wilayah yang tidak hanya dihuni oleh penduduk asli setempat, namun sudah merupakan daerah yang heterogen. Dengan demikian, kelompok-kelompok tani yang ada di empat kecamatan ini juga sudah sangat bervariasi, antara lain dari karakteristik anggotanya, komoditi yang diusahakan dan status pengusahaan lahan. Hampir seluruh petani pendatang merupakan petani penyewa lahan yang merupakan lahan milik penduduk asli.

Ditinjau dari komoditi yang diusahakan, di Kecamatan Leitimur Selatan pada umumnya para petani mengusahakan tanaman tahunan (durian, langsung, duku, manggis, salak) dan tanaman perkebunan (cengkeh, pala, dan sagu), disamping tanaman lain yaitu pisang. Tanaman sayuran hanya dalam skala kecil dan bukan tanaman utama. Ternak yang diusahakan meliputi ayam dan babi. Bidang perikanan umumnya merupakan usaha menjaring ikan dan nelayan kecil-kecilan. Pada tiga kecamatan lainnya, usahatani lebih bervariasi tergantung petani yang mengusahakannya. Jika petani adalah penduduk asli, maka variasi komoditi usahatani tidak jauh berbeda dengan yang ada di Kecamatan Leitimur Selatan, namun jika petani merupakan pendatang, maka komoditi yang diusahakan adalah sayur-sayuran dan palawija (jagung dan ubi kayu). Ternak yang diusahakan juga terdapat kambing, sedangkan di bidang perikanan, budidaya ikan dalam keramba juga sangat berpeluang untuk diusahakan.

Implikasi dari keadaan tersebut adalah bahwa pembinaan kelompok tani di satu wilayah haruslah berbeda dengan wilayah lainnya menurut karakteristik anggotanya serta karakteristik cabang usahatani. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok tani yang beranggotakan penduduk asli tentu memiliki karakter anggota yang berbeda dengan kelompok tani yang beranggotakan para pendatang, oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tentu saja berbeda.

Karakteristik cabang usahatani juga akan mempengaruhi pembinaan kelompok tani. Sudah saatnya materi penyuluhan tidak lagi hanya seputar tanaman, tetapi bagi yang memiliki kombinasi cabang usaha (tanaman, ternak, dan nelayan) dibutuhkan informasi yang menyangkut cabang-cabang usaha tersebut. Hal ini dimaksudkan agar anggota kelompok tidak lagi susah payah untuk mencari informasi tentang usahanya, petani cukup bergabung dalam kelompok taninya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Dengan kata lain, penataan kelompok tani dilakukan dengan menata ulang kebutuhan-kebutuhan setiap kelompok tani untuk dipenuhi, terutama berkaitan dengan informasi-informasi terkini tentang usaha petani. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi kelompok tani sebagai wahana belajar bagi para petani.

Disamping faktor kelompok tani, faktor pendukung kelompok tani juga menjadi penentu dalam menata kembali kelompok tani, diantaranya adalah penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan sistem penyuluhan pertanian yang melingkupinya. Pada saat ini cukup banyak para PPL di Kota Ambon yang melanjutkan studi dengan harapan setelah tamat tidak lagi bekerja sebagai PPL melainkan akan menjadi pegawai pada dinas yang terkait. Bagi para PPL, tugas sebagai penyuluh pertanian bukan pekerjaan yang menjanjikan dan ini membawa implikasi bagi kinerja PPL. Hampir di setiap wilayah kerja penyuluhan pertanian, kehadiran PPL cukup minim, bahkan di beberapa tempat terlihat rumah dinas PPL sangat jarang dihuni. Hasil penelitian di salah satu desa di Kota Ambon juga menunjukkan bahwa materi penyuluhan yang disampaikan oleh PPL ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan para petani. PPL memberikan materi budidaya tanaman yang tidak pernah dan tidak dapat dibudidayakan petani di daerah

tersebut. Hal ini sangat ironis karena seharusnya para petani berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dari para PPL sebagai agen pembaharu.

Faktor penentu lainnya adalah sistem penyuluhan pertanian yang pada saat ini masih mengikuti pola lama. Bagi Kota Ambon, perbedaan-perbedaan yang ada antar kecamatan dan di dalam kecamatan menyebabkan penyuluhan harus berbasis kondisi desa, bukan kecamatan. Oleh sebab itu, kebutuhan PPL harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap desa, baik jumlah maupun kompetensi PPL.

Proses Penataan Kelompok Tani

Berdasarkan faktor penentu yang telah diuraikan tersebut, maka proses penataan kelompok tani di Kota Ambon dapat dilakukan melalui penataan kelompok tani dan pihak-pihak yang terkait dengan kelompok tani. Lazarsfeld & Reitz, (1975) menjelaskan bahwa ada pilihan diantara dua alternatif yang seringkali terjadi ketika penelitian menunjukkan ketidakcocokan antara pengaturan suatu organisasi dan orang-orang yang menganggap menggunakannya, yaitu mengganti orang-orang atau mengganti organisasi. Namun, dalam menata kelompok tani, kedua hal tersebut dipadukan dengan menata kembali kelompok tani dan para anggotanya. Secara garis besar penataan kelompok tani di Kota Ambon dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Mendata kembali keberadaan kelompok tani. Hal ini dilakukan karena tidak semua kelompok tani dibentuk atas kemauan dan inisiatif para petani. Banyak kelompok tani yang dibentuk karena ada kegiatan atau program-program khusus yang membutuhkan kehadiran kelompok tani. Sumarjo (2003) menyatakan bahwa kebanyakan kelompok-kelompok petani binaan yang dibentuk melalui proyek-proyek yang bersifat pembinaan dalam waktu yang terbatas (setahun) mengalami lingkungan sosial yang tidak kondusif bagi pengembangan kelembagaan kesejahteraan masyarakat sehingga efektivitasnya tidak lestari. Kelompok tani yang hanya beraktivitas sesaat saja perlu diputuskan apakah akan diteruskan atau tidak dengan mempertimbangkan faktor-faktor terkait, misalnya keanggotaan kelompok tani, kepemimpinan kelompok tani, aktivitas kelompok, dinamika kelompok, dan manfaat kelompok. Tidak perlu mempertahankan kelompok tani yang secara

nyata memang sudah tidak berfungsi lagi, namun hal ini harus dilakukan secara berhati-hati karena ada pula kenyataan bahwa kelompok yang dibentuk karena adanya suatu proyek justru berkembang menjadi kelompok yang maju; (2) Mendata kembali keanggotaan dan pengurus kelompok tani. Keanggotaan kelompok tani seharusnya bukan melalui paksaan, tetapi melalui keinginan dari petani itu sendiri. Motivasi petani menjadi anggota kelompok tani akan mempengaruhi perilakunya sebagai anggota kelompok tani. Menurut Nasir (2009), setiap anggota kelompok tani memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: (a) bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan usahatani yang bersangkutan, (b) wajib mengikuti dan melaksanakan petunjuk pengurus kelompok tani dan petugas/penyuluh serta kesepakatan yang berlaku, (c) wajib bekerjasama dan akrab antar sesama anggota, pengurus maupun dengan petugas/penyuluh, dan (d) hadir pada pertemuan berkala dan aktif memberikan masukan, saran dan pendapat demi berhasilnya kegiatan usahatani kelompok

Pada kenyataannya, banyak anggota kelompok tani yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota kelompok tani. Beberapa alasan yang mendasarinya juga beragam, ada yang karena tidak tahu, ada yang tidak mau/enggan, dan ada pula yang tidak merasakan manfaat kelompok bagi dirinya. Padahal, manfaat kelompok akan terasa apabila seluruh individu dalam kelompok saling bekerjasama mencapai tujuan kelompok.

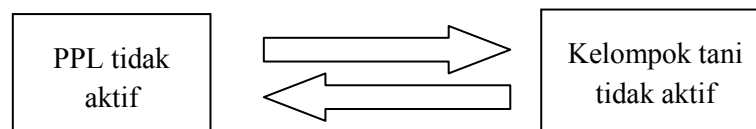
Kepengurusan pada setiap kelompok tani juga perlu dilihat kembali. Banyak ditemukan pengurus kelompok tani yang tidak aktif menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Adapun tugas dan tanggungjawab pengurus kelompok tani adalah sebagai berikut (Nasir, 2009): (1) Membina kerjasama dalam melaksanakan usahatani dan kesepakatan yang berlaku dalam kelompok tani, (2) Wajib mengikuti petunjuk dan bimbingan dari petugas/penyuluh untuk selanjutnya diteruskan pada anggota kelompok, (3) Bersama petugas/penyuluh membuat rencana kegiatan kelompok dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran dan lain-lain, (4) Mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas dan inisiatif anggota, (5) Secara berkala, minimal satu bulan sekali mengadakan pertemuan/musyawarah dengan para anggota kelompok yang dihadiri oleh

petugas/penyuluh, dan (6) Mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan kepada anggota, selanjutnya membuat rencana dan langkah perbaikan.

Sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab anggota dan pengurus kelompok tani tersebut, maka diperlukan sosialisasi tentang tugas dan tanggungjawab anggota dan pengurus kelompok tani agar dapat diketahui dan dipahami untuk dilaksanakan. Tanpa adanya kesungguhan dari anggota dan pengurus kelompok tani dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing, kelompok tani tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Disadari hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Dibutuhkan kesadaran, kerelaan dan motivasi yang tinggi dari anggota dan pengurus kelompok tani. Oleh karena itu, pendataan kembali keanggotaan dan pengurus kelompok tani bertujuan untuk melihat sampai sejauhmana tugas dan tanggungjawab sebagai anggota dan pengurus kelompok tani telah dilaksanakan.

Penataan Distribusi PPL

Saat ini jumlah PPL di Kota Ambon masih kurang dibandingkan jumlah petani yang membutuhkannya, namun jumlah PPL yang sedikit ini juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagian besar petani dan kelompok tani tidak mendapatkan pembinaan yang semestinya dari PPL. Memang disadari banyak kesulitan yang dihadapi oleh PPL, mulai dari wilayah kerja yang cukup luas untuk ditangani, kompetensi yang kurang mendukung, hingga kelompok tani yang kurang berfungsi. Antara kelompok tani dan PPL saling menuding sebagai penyebab tidak aktifnya PPL dan kelompok tani seperti pada gambar berikut.



Kenyataan seperti tersebut seharusnya tidak terjadi jika antara PPL dan kelompok tani saling berinteraksi dengan baik sehingga komunikasi tetap terjalin.

Sesuai dengan kondisi Kota Ambon, maka distribusi PPL seharusnya mengacu kepada kebutuhan tingkat desa karena pada tingkat desa homogenitas cabang usahatani dan karakteristik petani/kelompok tani relatif lebih tinggi, tidak demikian halnya pada tingkat kecamatan. Disamping itu, kompetensi PPL juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan para anggota kelompok tani.

Terkait dengan penataan distribusi PPL adalah penataan materi penyuluhan. Materi penyuluhan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan para petani serta tidak terbatas hanya pada aspek budidaya saja, tetapi juga perlu dilengkapi dengan aspek pemasaran, pembiayaan, serta aspek kelompok dan kepemimpinan. Selama ini materi PPL sering terfokus pada aspek teknis saja dan melupakan aspek non teknis, bahkan aspek kepemimpinan hampir tidak pernah diberikan.

Mengacu kepada kebutuhan kelompok tani, maka para PPL juga perlu dilengkapi dengan kompetensi-kompetensi pendukung, diantaranya penguasaan terhadap ilmu sosiologi agar dapat memahami perilaku individu dalam konteks sosial sesuai dengan pendapat Ritzer (Syahyuti, 2009) yang mengatakan bahwa sosiologi mempelajari manusia dalam hubungannya dengan latar belakang sosialnya, yaitu kelompok, organisasi, budaya, dan masyarakat; serta kesalinghubungan antar semua komponen tersebut. Dari seluruh komponen tersebut, sosiologi mempelajari perilaku. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial, serta bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut. Dengan memahami perilaku individu dalam konteks sosial, maka seorang PPL akan dapat membina kelompok tani dengan lebih baik.

Terkait dengan kompetensi seorang penyuluh, Kim *et al.*, (2009) melalui penelitiannya menjelaskan bahwa para penyuluh pertanian di Korea seharusnya memiliki kompetensi-kompetensi tertentu dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya kompetensi dalam strategi bisnis, mengontrol dan mengawasi atmosfer kelompok tani, mengembangkan kemampuan para petani binaannya, menggunakan teknologi informasi, memperbaiki proses penyuluhan, dan

kompetensi lainnya. Dengan kata lain, kompetensi penyuluh bukan hanya pada aspek teknis saja, tetapi juga pada aspek non teknis.

Adanya variasi cabang usahatani yang ditekuni oleh anggota kelompok tani juga membutuhkan kompetensi yang beragam dari PPL. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh seorang PPL maka sudah seharusnya jumlah PPL ditambah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Memang, disadari hal ini akan menimbulkan pengeluaran yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayainya, namun sebagai negara agraris, adalah wajar jika pemerintah benar-benar memperhatikan pembangunan pertanian dengan segala kelengkapannya, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga PPL.

Melestarikan Kearifan Lokal

Selama ini pembinaan kelompok tani di Kota Ambon dilakukan menurut pola pembinaan kelompok tani di Pulau Jawa tanpa memperhatikan hal-hal yang merupakan ciri masyarakat di Kota Ambon. Bagi para petani yang merupakan penduduk asli, banyak kearifan lokal yang mempengaruhi dalam kegiatan usahatani, misalnya budaya sasi dan sistem pengelolaan dusung yang merujuk ke sistem *agroforestry*. Pembinaan terhadap kelompok tani yang meniadakan atau melupakan kearifan lokal ini tidak akan mendapat dukungan dari kelompok tani. Bagi kelompok tani yang memiliki anggota dari berbagai suku pendatang, pembinaan kelompok tani hendaknya harus dapat mengakomodir adat-istiadat semua orang sehingga tidak ada anggota yang merasa disepelekan. Disinilah pentingnya penguasaan sosiologi oleh seorang PPL.

Implementasi Undang-Undang No.16/2006

Peran pemerintah tidak dapat dipisahkan dalam menata kembali kelompok tani di Kota Ambon. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diharapkan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Agar hal itu dapat terwujud, dibutuhkan keseriusan Pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang tersebut demi terwujudnya pertanian, perikanan dan kehutanan yang tangguh yang mampu memenuhi kebutuhan

pangan, papan dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.16/2006. Sangat disayangkan bahwa hingga saat ini implementasi Undang-Undang tersebut di Kota Ambon belum berjalan dengan baik dengan berbagai kendala sebagai alasannya.

Kesimpulan

Berdasarkan kenyataan yang ada tentang kelompok tani di Kota Ambon, maka diperlukan upaya menata kembali kelompok tani di Kota Ambon agar keberadaan kelompok tani dapat berfungsi sebagaimana mestinya (sebagai wahana belajar dan wahana bekerjasama). Penataan kembali kelompok tani di Kota Ambon dilakukan berdasarkan tiga langkah utama, yaitu: (1) Penataan kembali kelompok tani yang meliputi keberadaan kelompok tani, keanggotaan kelompok tani, dan kepengurusan kelompok tani. Keberadaan kelompok tani dimaksudkan untuk melihat keberadaan kelompok tani yang dibentuk berdasarkan keinginan para petani dan kelompok tani yang dibentuk berdasarkan adanya program-program atau proyek-proyek tertentu yang bersifat sementara. Disamping itu perlu pula didata kembali motivasi keanggotaan kelompok tani dan pengurus kelompok tani serta pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota dan pengurus kelompok tani; (2) Penataan distribusi PPL yang meliputi penataan jumlah dan kualifikasi/kompetensi PPL terkait dengan kebutuhan petani/kelompok tani dalam lingkup setiap desa, serta penataan materi-materi penyuluhan; (3) Melestarikan kearifan lokal terutama yang terkait dengan kehidupan petani dan pertanian di Maluku; dan (4) Keseriusan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon dalam mengimplementasikan Undang-Undang No.16/2006.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kota Ambon. 2014. Kota Ambon dalam Angka 2014.
- Kim Jin-Mo., Kong, Min-Young., Ju, Dae-Jin. 2009. "Challenges in public agricultural extension of Korea". *Journal of International Agricultural and Extension Education*. 16(3):33-46.
- Lazarsfeld, P. F., J. G. Reitz. 1975. *An Introduction to Applied Sociology*. New York: Elsevier Scientific Publishing Company, Inc.
- Mardikanto, T. 1996. *Penyuluhan Pembangunan Kehutanan*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Pertanian UNS.
- Mwaura, F. 2014. "Effect of farmer group membership on agricultural technology adoption and crop productivity in Uganda". *African Crop Science Journal*. 22(4):917-927.
- Nasir. 2009. *Pengembangan dinamika kelompok tani*, dalam <http://www.deptan.go.id/daerah_new/banten/dispertanak_pandeglang/artikel_11.htm > diakses 20 April 2010.
- Sumarjo. 2003. "Kepemimpinan dan Kelembagaan Perdesaan: Kasus Kelembagaan Ketahanan Pangan" dalam *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Penyunting: Ida Yustina dan Adjat Sudrajat. Bogor: IPB Press.
- Syahyuti. 2009. *Sosiologi dan Perkembangannya*, dalam <<http://www.syahyuti.multiply.com/journal>> diakses 04 Juli 2010.
- Tolno, E., Kobayashi, H., Ichizen, M., Esham, M., Balde, B. S. 2015. "Economic analysis of the role of farmer organizations in enhancing smallholder potato farmers' income in Middle Guinea". *Journal of Agricultural Science*. 7(3):123-137.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.